

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah satuan wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat pada suatu daerah tertentu. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang kepala desa harus bisa meyakinkan berbagai masyarakat dan mendapat dukungan secara luas. Oleh karena itu untuk meyakinkan berbagai masyarakat seorang Kepala Desa membutuhkan strategi kepemimpinan yang baik.

Kepemimpinan diambil dari kata pemimpin yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam menangani suatu organisasi sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kemampuan ini merupakan bentuk kontrol seseorang yang didasarkan pada kemampuan individu untuk mendukung dan mengajak orang lain dalam melakukan sesuatu guna mencapai tujuan bersama. (Lamangida et al., 2017). Kepemimpinan ini pada dasarnya berarti hakikat kemampuan, proses dan gagasan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati oleh orang lain dengan segala keikhlasan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan yang dimiliki seseorang tersebut (Siau et al., 2017).

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dan memberikan contoh dari pemimpin kepada staffnya guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi. Keahlian dalam mempengaruhi dan memimpin seseorang melalui kepatuhan, kepercayaan, rasa hormat, kerja sama, menginspirasi, dan membimbing seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini menyangkut tiga hal yaitu pemimpin, pengikut dan keadaan tertentu. Kepemimpinan ini adalah sumber pengaruh yang bersifat formal maupun informal (Purnama, 2017). Posisi kepemimpinan dalam struktur sosial berperan untuk mengatur, mengontrol, dan mengawasi masyarakat. Dalam pendekatan struktural-fungsional ini ada interaksi dan komunikasi dua arah antara kedua elemen tersebut. Namun

untuk mengambil posisi tersebut, seorang pemimpin harus memiliki legitimasi.

Legitimasi merupakan suatu aturan yang berkaitan dengan validitas, keabsahan atau berisi pengakuan secara formal dan kualitas otoritas yang dianggap benar dan sah (Muhliadi, 2013). Selain itu legitimasi adalah pengakuan sosial dan pengakuan dari masyarakat pada hak moral seorang pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan-keputusan politik (Hidayah, 2020). Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan dan kewenangannya. Legitimasi juga dapat diartikan sebagai penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan prosedur publik dan sesuai kondisi nilai-nilai politik atau etika yang berlaku. Sistem politik akan lestari dan berkelanjutan jika seluruh sistem politik didukung oleh penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah saja yang membutuhkan legitimasi tetapi juga unsur-unsur politik. (Farel, 2021).

Berdasarkan uraian diatas maka legitimasi ini sangat penting bagi berbagai kepentingan, baik individu atau kelompok. Dengan legitimasi maka seorang individu memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan yang diinginkan. Suatu kepemimpinan atau pemerintah yang tidak mendapatkan legitimasinya dari masyarakat akan sangat sulit untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah kompleks bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan karena tidak adanya kesepakatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Oleh karena itu banyak seseorang yang membutuhkan kekuasaan yang berlegitimasi. Salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan yang berlegitimasi adalah dengan memiliki jabatan. Jabatan pada umumnya memiliki kekuasaan, namun besar kecilnya kekuasaan tersebut dapat diukur dengan tinggi rendahnya suatu jabatan. Jabatan tertinggi di pemerintahan Desa adalah Kepala Desa. Bahkan dalam proses pemilihan kepemimpinan yang akan maju dalam pemilu maupun pilkada dari tingkat pusat hingga daerah sangatlah berbeda (Anggara et al., 2019). Oleh karena itu strategi

kepemimpinan kepala desa sangat diperlukan guna mempengaruhi masyarakat agar kepala desa tersebut dapat memperoleh legitimasinya (Richa, 2015).

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agatha Awwala Richa (Richa, 2015) tentang “Kekuasaan Dan Wibawa Kepala Desa: Kajian Tentang Upaya Kepala Desa Memperoleh Dan Mempertahankan Kekuasaan Di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Nganjuk” menunjukkan hasil bahwa seseorang mendapatkan kekuasaan atau legitimasi melalui sumber-sumber yang dimilikinya dengan memanfaatkan karakteristik masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Oleh karena itu dengan adanya kepercayaan dan sumber-sumber kekuasaan itulah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi yang sah.

Selanjutnya kedua berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kisno Hadi (Hadi, 2018) tentang “Legitimasi Kekuasaan Dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma’anyan” menunjukkan hasil bahwa seseorang dapat memperoleh legitimasi yaitu dengan cara yang pertama pemimpin politik harus menguasai aturan yang berlaku dimasyarakat, melalui proses pembelajaran dibidang kepemimpinan dan kekuasaan (lulusan ilmu politik atau ilmu pemerintahan), melalui prinsip senioritas (tidak terlalu tua atau muda, adanya pembatasan usia), tidak mempermasalahkan kedudukan laki-laki maupun perempuan (gender). Kedua rakyat berhak dalam kekuasaan sebagai mekanisme kontrol terhadap pemimpin melalui badan perwakilan (dewan adat atau BPD), rakyat berhak menuntut pemimpin untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak kompeten atau melakukan perbuatan tercela (korupsi serta menyimpang dari norma), rakyat berhak tidak mau bertemu pemimpin apabila pemimpin tersebut berlaku tidak adil, rakyat berhak untuk tidak memilihnya kembali apabila dalam kepemimpinannya gagal dalam mensejahterakan rakyatnya.

Studi pendahuluan telah peneliti lakukan di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Berdasarkan pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan kepala desa disetiap pemilihan umum selalu menimbulkan pro dan kontra. Pada pemerintahan yang lama berhasil namun tidak bisa berlanjut pada periode berikutnya. Tentu dalam mendapatkan jabatan sebagai calon Kepala Desa tersebut memiliki berbagai macam faktor yang dapat mendukung seorang agar terpilih menjadi Kepala Desa. Mereka harus meyakinkan beribu masyarakat dengan berbagai macam sifat dan karakteristiknya. Jadi dalam perebutan kemenangan calon-calon Kepala Desa tentunya memiliki strategi-strategi khusus untuk meyakinkan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya dengan adanya pergantian kepemimpinan di Desa Doho ini menarik untuk diteliti karena pada kepemimpinan yang baru ini mendapatkan suara yang cukup signifikan dengan perolehan hak pilih suara mengalahkan kepemimpinan yang lama.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memperoleh Legitimasi (Studi Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kepemimpinan yang dilakukan Kepala Desa Doho?
2. Bagaimana cara Kepala Desa dalam mendapatkan legitimasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi kepemimpinan Kepala Desa Doho.
2. Untuk mengetahui cara Kepala Desa dalam mendapatkan dan mempertahankan legitimasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diterima peneliti ketika menjadi mahasiswa.
2. Bagi kepala desa, hasil penelitian ini bermanfaat untuk dapat memanfaatkan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat dengan baik serta bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam melaksanakan kepemimpinannya, khususnya Desa Doho.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pentingnya legitimasi dari seorang pemimpin demi kepentingan bersama
4. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan referensi maupun bahan pelengkap bagi penelitian yang selanjutnya.

